

**PERAN KESBANGPOL ACEH DALAM EDUKASI PUBLIK :
STUDI KASUS DEMONSTRASI PT EMAS MINERAL MURNI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SURYA ARIANTARA

NIM. 190802068

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2025 M / 1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Surya Ariantara
NIM :190802068
Program Studi :Ilmu Administrasi Negara
Fakultas :Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir :Perumnas, 28-03-2001
Alamat :Kp. Pinangan, Kec. Kebayakan, Aceh Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2025

Yang Menyatakan,


SURYA ARIANTARA
NIM. 190802068

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN KESBANGPOL ACEH DALAM EDUKASI PUBLIK : STUDI KASUS
DEMONSTRASI PT EMAS MINERAL MURNI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negara**

Oleh :

SURYA ARIANTARA

NIM. 190802068

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :**

Pembimbing I,



Reza Idria, S.H., M.Si., Ph.D

NIP. 198103162011011003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG
PERAN KESBANGPOL ACEH DALAM EDUKASI PUBLIK :
STUDI KASUS DEMONSTRASI PT EMAS MINERAL MURNI

SKRIPSI

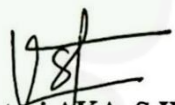
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal Sidang: Selasa, 31 Januari 2025
Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Reza Idria, S.HI., M.Si., Ph.D
198103162011011003

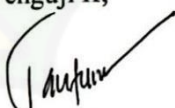
Sekretaris.


Lestari AKA, S.IP
198808082020122020

Penguji I,


Dr. Delfi Suganda, S.HI., LL.M
198611122015031005

Penguji II,


Dr. Taufik, S.Sos., M.Si
198905182023211032

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 19743271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh dalam edukasi publik terkait demonstrasi PT Emas Mineral Murni (PT EMM) serta mengidentifikasi hambatan yang muncul selama proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kesbangpol Aceh memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial-politik melalui koordinasi lintas sektor, deteksi dini potensi konflik, dan penyelenggaraan sosialisasi serta Focus Group Discussion (FGD) yang berfokus pada edukasi etika demokrasi dan penyampaian pendapat. Selain itu, media sosial dimanfaatkan sebagai alat strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat dan menangkal disinformasi. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan, termasuk keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana, serta tantangan dalam mengelola komunikasi dengan massa yang besar. Studi ini merekomendasikan pengembangan program edukasi khusus untuk mahasiswa, optimalisasi penggunaan media sosial, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur Kesbangpol guna mendukung pelaksanaan edukasi publik yang lebih efektif dan responsif.

Kata Kunci : Edukasi Publik, Demonstrasi, Deteksi dini Konflik, Kesbangpol Aceh

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Kesbangpol Aceh dalam Edukasi Publik : Studi Kasus Demonstrasi PT Emas Mineral Murni”**. Selanjutnya Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para ulama.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Skripsi ini yaitu untuk memenuhi Sebagian syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini peneliti telah banyak mendapatkan Bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia S.A.g. M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah B.Sc, MPA. Selaku Ketua Prodi Program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Reza Idria, S.HI., M.Si., Pd.D. Selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberi saran serta memberikan arahan bagi peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Cut Zamharira, S.IP., M.AP Selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada peneliti.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

7. Ayahanda Arsaludin dan Ibunda Syamsiah yang senantiasa memberikan segenap dukungan dan doa yang tiada hentinya kepada penulis.
8. Terima kasih kepada kakak-kakak saya Meilisa Itawari, Meilida Rizki, Desi Maharani, Lestari yang telah memberi dukungan semangat dan bantuannya selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Khosik Amandani yang telah memberikan dukungan dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan sebaik-baiknya balasan kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 24 November 2025

Penulis,

Surya Ariantara

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Teori Peran.....	12
2.2.2 Konsep Edukasi publik	18
2.2.3 Teori Manajemen Konflik.....	22
2.3 Kerangka Berfikir Penelitian	27
BAB III METODELOGI PENELITIAN	28
3.1 Pendekatan Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian	28
3.3 Lokasi Penelitian	29
3.4 Sumber Data.....	30
3.4.1 Data Primer	30
3.4.2 Data Sekunder	30
3.5 Informan Penelitian.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7 Teknik Analisis Data	34
3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.....	37
4.1.2 Deskripsi Karakteristik Informan.....	40
4.1.3 Peran dan Strategi Kesbangpol dalam Edukasi Publik Studi kasus PT Emas Mineral Murni.....	41
4.1.4 Hambatan yang dihadapi kesbangpol dalam Proses Edukasi Publik di Perguruan Tinggi	52
4.2 Pembahasan.....	54
4.2.1 Peran dan Strategi Kesbangpol dalam Edukasi Publik Studi kasus PT Emas Mineral Murni.....	54
4.2.2 Hambatan yang dihadapi kesbangpol dalam Proses Edukasi Publik di Perguruan Tinggi.....	59
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2 Fokus Penelitian.....	29
Tabel 3.5 Informan Penelitian.....	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir.....	27
Gambar 4.1.1 Struktur Badan Kesbangpol Aceh	40
Gambar 4.1.3 Sosialisasi Regulasi Penanganan Konflik sosial di Aceh Barat.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Pertanyaan.....	68
Lampiran 2. Surat Keputusan Pembimbing.....	71
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	72
Lampiran 4. Surat Rekomendasi Penelitian.....	73
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT. Emas Mineral Murni (EMM) adalah salah satu perusahaan tambang emas yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya tepatnya Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang. Dilansir dari data Kementrian Energi Sumber daya dan Mineral (ESDM) PT EMM merupakan perusahaan tambang yang termasuk dalam kategori Penanaman Modal Asing (PMA), Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), izin usaha pertambangan (IUP) hanya dapat diberikan dan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM, bukan lagi oleh pemerintah daerah.

Izin usaha pertambangan eksplorasi diterbitkan tahun 2006 berdasarkan SK Bupati Nagan Raya Nomor 545/68/KP-EKSPLORASI/2006 tentang pemberian kuasa pertambangan eksplorasi. Izin tambang diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan pembaharuan pada tahun 2010, pada awalnya izin usaha tambang PT EMM diberikan seluas 3.620 hektare berlokasi di Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Kemudian luas areal lahan PT EMM berubah menjadi 10.000 hektare berdasarkan SK kepala BKPM Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 pada tanggal 19 Desember 2017. Sejak itulah reaksi penolakan Pada PT EMM semakin marak dari masyarakat Beutong Ateuh Banggalang dengan menggelar aksi di daerah setempat.¹

Adapun masyarakat menolak keberadaan tambang karena daerah operasi tambang rawan terjadinya bencana ekologi lingkungan. Dengan demikian aksi-aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Beutong mulai terekspose ke khalayak ramai melalui media sosial serta adanya Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan (Walhi) yang mengugat PT EMM dan Paguyuban Mahasiswa Nagan Raya yang juga menyuarakan pencabutan izin PT EMM. Mahasiswa Aceh juga membentuk Barisan Pemuda Aceh (BPA) sebagai wadah pergerakan guna menghimpun massa untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Beutong dengan melakukan kajian, audiensi serta berujung pada aksi demonstrasi yang dilakukan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Kantor Gubernur Aceh. Aksi demonstrasi terjadi sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang tidak disetujui oleh masyarakat.²

Aksi demonstrasi mahasiswa dimulai pada tanggal 15 Oktober 2018, dilakukan berulang kali karena tuntutan mahasiswa tidak diproses lebih lanjut oleh Pemerintah Aceh. LSM Walhi telah menempuh jalur hukum ke PTUN Jakarta namun ditolak dengan berbagai alasan yang berarti PT EMM dapat melanjutkan aktivitasnya, oleh sebab itu barisan Pemuda Aceh melakukan mobilisasi massa besar-besaran di halaman kantor Gubernur Aceh yang berlangsung selama tiga hari, mulai 9 s.d. 11 April 2019.³ Massa dari mahasiswa turun ke jalan untuk menolak izin tambang PT Emas Mineral

¹ Afif. (2019, April 12). Geger Emas di Perut Bumi Aceh. *Merdeka.com*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/geger-emas-di-perut-bumi-aceh.html>.

² Alfajri, R. (2023), Strategi Mobilisasi Gerakan Sosial Mahasiswa Aceh Dalam Menolak PT Emas Mineral Murni di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(4).

³ Alfajri, R. (2023), Strategi Mobilisasi Gerakan Sosial Mahasiswa Aceh Dalam Menolak PT Emas

Murni (EMM), di Kantor Gubernur Aceh, Selasa 9 April 2019. Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Barisan Pemuda Aceh itu menganggap penambangan PT EMM di kawasan hutan lindung Beutong, Nagan Raya, akan mengancam kelestarian lingkungan dan warga sekitar. Izin PT EMM ini dinilai melangkahi kewenangan Pemerintah Aceh, yang dimana diatur dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah aceh, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2016 tentang kehutanan, dan Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara.⁴

Sementara itu pada saat aksi protes, partisipasi aktif mahasiswa dalam aksi protes meningkat. Adanya kesamaan identitas, interaksi yang berkesinambungan, dan kesamaan tujuan menimbulkan kesadaran dan solidaritas kolektif sehingga melahirkan gerakan-gerakan sosial yang menyampaikan aspirasi masyarakat. Gerakan sosial adalah tindakan yang mempunyai nilai kolektif, diungkapkan oleh sejumlah orang yang membentuk suatu kelompok, berdasarkan tujuan yang sama dan dalam proses yang melibatkan komunikasi dan mediasi dengan para pemangku kebijakan.⁵

Terjadi keributan akibat adanya provokasi saat para mahasiswa hendak masuk ke kantor menemui Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah sehingga saling dorong-mendorong, kemudian polisi mengeluarkan gas air dari mobil water canon kearah

Mineral Murni di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(4).

⁴ Michael Hangga Wismabrata, (2019, April 11). “ 5 Fakta Demo Mahasiswa di Aceh Tolak Izin Tambang, Ricuh hingga 9 Kali Tak Ada Tanggapan Plt Gubernur”. *kompas.com*. Diakses dari : <https://regional.kompas.com/read/2019/04/11/14523361/5-fakta-demo-mahasiswa-di-aceh-tolak-izin-tambang-ricuh-hingga-9-kali-tak?page=all>.

⁵ Alfajri, R. (2023), Strategi Mobilisasi Gerakan Sosial Mahasiswa Aceh Dalam Menolak PT Emas Mineral Murni di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(4).

mobil pengeras suara orator aksi, sehingga emosi pendemo terpancing. Akibat ricuh tersebut, beberapa mahasiswa mengalami luka lecet dan terkena tembakan gas air mata dikeluarkan pihak kepolisian.⁶

Akibat dari aksi kericuhan tersebut sejumlah fasilitas negara yang rusak pada halaman kantor Gubernur Aceh, seperti beberapa bagian pagar kiri dan kanan rusak, pagar yang terbuat dari rangkaian besi bolong, papan nama kantor Gubernur Aceh di depan taman juga dirusak. Seluruh huruf kapital yang sebelumnya bertuliskan “KANTOR GUBERNUR ACEH” dicopot dari posisinya, Sebuah tulisan "Disegel" berwarna merah tertulis dengan ukuran besar, Begitu pula dengan taman dan kolam di depan papan nama kantor gubernur tampak rusak parah dan ditutupi pagar besi yang sudah compang-camping. Kaca pos satpam yang rusak, kaca bagian depan kantor Gubernur Aceh pecah akibat didobrak mahasiswa, terjadinya kerusakan paving block pada halaman kantor Gubernur Aceh.⁷ Dengan terjadinya kerusakan barang negara tersebut mengakibatkan pemerintah harus mengeluarkan dana untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, serta adanya gangguan aktivitas pada kantor Gubernur Aceh.

Ketentuan mengenai kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala

⁶ Michael Hangga Wismabrata, (2019, April 11). “ 5 Fakta Demo Mahasiswa di Aceh Tolak Izin Tambang, Ricuh hingga 9 Kali Tak Ada Tanggapan Plt Gubernur”.kompas.com. Diakses dari : <https://regional.kompas.com/read/2019/04/11/14523361/5-fakta-demo-mahasiswa-di-aceh-tolak-izin-tambang-ricuh-hingga-9-kali-tak?page=all>.

⁷ Subur Dani, (2019 April 10). “ Plang Nama hingga Beberapa Bagian Pagar Kantor Gubernur Aceh Rusak Usai Demo Penolakan PT EMM” Diakses dari : <https://aceh.tribunnews.com/2019/04/10/plang-nama-hingga-beberapa-bagian-pagar-kantor-gubernur-aceh-rusak-usai-demo-penolakan-pt-emm?page=all>.

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 yang mengatur prosedur pelaksanaan pelayanan, pengamanan, dan penanganan kasus terkait penyampaian pendapat di ruang publik. Jika dikaitkan dengan peristiwa demonstrasi menolak izin tambang PT Emas Mineral Murni (EMM) yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik maka tentu saja hal ini melanggar ketentuan yang sudah ada. Hal tersebut dikarenakan demonstrasi tidak berjalan dengan tertib dan aman, serta terdapatnya kerusakan pada barang publik. Kemudian pada pasal 6 point (d) juga dijelaskan “Bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab; untuk menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum”. Pada pasal 8 dijelaskan “Bahwa masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai”.⁸ Mengenai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 di atas, penting dalam hal demonstrasi dikarenakan peraturan kapolri mengatur tata cara pemberitahuan dan penanganan demonstrasi sehingga berlangsung tertib dan aman. Hal ini penting untuk mencegah potensi kerusuhan atau tindakan anarkis yang dapat merugikan. Serta peraturan ini mengharuskan pemberitahuan kepada kepolisian setempat setidaknya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai. Ini memberi waktu bagi kepolisian untuk melakukan persiapan pengamanan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk kesbangpol, pemerintah daerah, dan penyelenggara demonstrasi.

⁸ Dokumen Peraturan Perundang-undangan, “ Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum” diakses dari : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45478/uu-no-9-tahun-1998>

Kesbangpol berperan untuk menangani permasalahan seperti demonstrasi dikarenakan kesbangpol memiliki mandat khusus Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol memiliki tugas pokok untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.⁹

Dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan stabilitas politik di wilayahnya yang dimana kesbangpol bertugas untuk memastikan bahwa setiap konflik atau potensi konflik dapat diselesaikan melalui jalur dialog dan mediasi, bukan kekerasan. Kesbangpol juga memiliki pengalaman dan keahlian dalam mediasi konflik antara berbagai pihak, baik antara masyarakat dengan perusahaan, maupun masyarakat dengan pemerintah. Dengan melibatkan kesbangpol, masyarakat dapat lebih terlibat dalam hal proses pengambilan keputusan. kesbangpol dapat menyelenggarakan forum-forum diskusi publik, pertemuan komunitas, dan workshop yang memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan kekhawatiran mereka secara langsung kepada pihak yang terkait.

Maka dari itu penting kehadiran kesbangpol dalam hal edukasi publik pada demonstrasi PT EMM, adapun tugas kesbangpol mencakup pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang, seperti pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku

⁹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan hingga pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.¹⁰ Sebelum demonstrasi ada kewajiban untuk mendapat izin kesbangpol, kesbangpol juga berperan dalam edukasi politik mahasiswa terkait etika demonstrasi.

Kesbangpol memiliki peran yang signifikan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, seperti kerusakan fasilitas negara dan fasilitas publik seperti trotoar jalan. Pengawasan terhadap barang publik menjadi hal yang sangat vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ Peran Kesbangpol Dalam Edukasi Publik : Studi Kasus Demonstrasi PT Emas Mineral Murni”.

1.1 Identifikasi Masalah

identifikasi masalahnya kurangnya memahami Batasan- batasan dalam menyampaikan pendapat, yang dapat mengarah pada tindakan anarkis atau melanggar hukum selama demonstrasi, dan kurangnya dalam edukasi publik kepada mahasiswa terkait etika demonstrasi. Kecurigaan tersebut berdasarkan pada fenomena yang terjadi di tahun 2019 yaitu kerusakan fasilitas publik Ketika demonstrasi PT Emas Mineral Murni.

¹⁰ Dokumen Peraturan Perundang-undangan, “Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik” diakses dari : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/127862/permendagri-no-11-tahun-2019>.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan strategi Kesbangpol dalam edukasi publik?
2. Apa hambatan yang dihadapi kesbangpol dalam proses edukasi publik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dan strategi kesbangpol Aceh dalam edukasi publik studi kasus demonstrasi PT emas mineral murni.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi kesbangpol Aceh dalam proses edukasi publik

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Berkaitan dengan peran Kesbangpol Aceh dalam pendidikan publik: Studi Kasus Demonstrasi PT Emas Mineral Murni, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sumber informasi khususnya pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, mengenai Peran Kesbangpol Aceh dalam Edukasi Publik : Studi kasus Demonstrasi PT Emas Mineral Murni.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi atau masukan kepada pemerintah, khususnya pemerintah pada provinsi Aceh terkait Peran Kesbangpol Aceh dalam Edukasi Publik : Studi kasus Demonstrasi PT Emas

Mineral Murni, sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih terukur dan strategis di masa depan, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perbaikan, sekaligus menjadi sumber referensi yang relevan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

